

Analisis Faktor Implementasi E-Government Di Kabupaten Jayawijaya Papua

Syarifah^{1*}, Dafrin Muksin², Muhammad Fadlan³

¹ Program Studi Manajemen Retail, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua, Indonesia

³ Program Studi Sistem Informasi, STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati, Kalimantan Timur, Indonesia

syarifah@unaim-wamena.ac.id*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received Desember 2023

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

Keywords

Implementation;
 Factors;
 E-Government;
 3T Region

ABSTRACT

The development of e-government innovation in Indonesia in recent years has been initiated to create an integrated government system at both central and regional government levels. E-government has a very good impact on the implementation of government, namely the implementation of effective and efficient government. However, the problem is how e-government can be implemented in government administration. The problem of implementing e-government is closely related to government readiness, including leadership, management readiness and infrastructure readiness. The aim of this research is to examine and analyze the factors that influence the implementation of e-government in the 3T Region of Jayawijaya Regency, Papua. This research was conducted using descriptive and qualitative methods. The sample in this study was 10 ASN in the Jayawijaya OPD and 100 Jayawijaya Regency residents. The indicators used are ease of access, always available, security and trust, integration, and cost. Based on data analysis, the results show that the indicators for ease of access, always available, security and trust, and integration received a poor rating. Then the implementation of e-government on cost indicators is felt to be cost-effective by the people of Jayawijaya Regency. Apart from that, it was found that there were 4 (four) supporting factors and 6 (six) inhibiting factors in implementing e-government. In this way, it is hoped that this research can be used as evaluation material in the implementation of e-government in the 3T Region of Jayawijaya Regency.



PENDAHULUAN

Pengembangan e-government telah menjadi fokus utama dalam transformasi administrasi publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang telah memperlihatkan komitmen kuat terhadap penerapan teknologi informasi dalam layanan publik (Farida et al., 2020; Sabani, 2020). Seiring dengan perkembangan global teknologi, negara-negara semakin mengarah pada pemanfaatan e-government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi (Deswanto et al., 2021; Dwivedi et al., 2016). Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan kompleksitas administratif yang tinggi, telah aktif memperkenalkan inisiatif e-government untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat keterhubungan antara pemerintah dan warga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikan teknologi dalam layanan publik di Indonesia, namun tantangan-tantangan seperti akses terhadap teknologi, infrastruktur yang terbatas, dan inklusi digital tetap menjadi fokus dalam upaya penerapan e-government (Setyasih, 2023; Wirawan, 2020)

Pemerintah Indonesia termasuk aktif dalam mengembangkan sistem e-government demi perbaikan tata kelola layanan publik. Inovasi e-government di Indonesia beberapa tahun belakangan telah diinisiasi oleh pemerintah. Dalam penerapannya e-government, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Untuk itu, dalam peningkatan kualitas implementasi e-government berbagai upaya harus dilakukan secara terus menerus, sehingga keberhasilan e-government dapat tercapai (Elysia et al., 2017). Perkembangannya nampak terlihat dari keberadaan situs-situs pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat kabupaten/kota, tetapi pembangunan sistem e-government tidak semuanya dapat diterapkan dengan baik. Disebabkan karena ketidak siapan pemerintah yaitu peran aktor kepemimpinan yang didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan manajemen rencana yang jelas, dan kesiapan infrastruktur sesuai standar pembangunan sistem e-government (Sutedjo & Oetomo, 2015).

Perkembangan inovasi e-government di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini telah diinisiasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi baik ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Pengembangan e-governmnet dilandasi pada keputusan Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional dan beberapa regulasi yang berkaitan diantaranya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Untuk itu pelayanan public menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat (Elysia et al., 2017)

Pemanfaatan teknologi internet dalam pemerintahan atau e-government diyakini sangat efektif dalam melakukan pelayanan publik diantaranya adalah dapat mendorong pemerintahan yang responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. E-government dapat mendorong keterbukaan informasi serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan aktifitas pelayanan dapat memberikan hasil yang maksimal yakni, tercapainya pelayanan yang berkelanjutan (Sustainability) bagi masyarakat, sebab e-government merupakan sebuah indikator ataupun fondasi dalam mewujudkan Smart City (Arjita, 2017). E-government merupakan jembatan komunikasi untuk menghubungkan

instansi pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah para pembisnis, serta instansi pemerintah dengan pemerintah yang lain. Untuk mengatasi permasalahan e-government dapat dilakukan dengan strategi utama yaitu; dengan melakukan standarisasi, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan melakukan manajemen perubahan (Hasibuan & Santoso, 2005).

Melalui proses transformasi menuju era e-government tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi serta sekaligus membentuk jaringan sistem manajemen dalam proses kerja, yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembaharuan dalam menyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini adalah dengan melakukan optimalisasi pelayanan publik melalui e-government.

Pada sebagian besar lembaga pemerintah telah melakukan inisiatif e-government, namun penerapannya masih berada pada tahap awal pengembangan yakni tahapan persiapan dan hanya sebagian kecil telah berhasil mencapai tahapan pematangan. Inisiatif tersebut apabila ditelaah secara mendalam menunjukkan inisiatif yang dilakukan belum mengarah pada pertumbuhan e-government yang baik. Dalam artian bahwa e-government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut tanpa disertai dengan kualitas. Di sisi yang lain perkembangan global menuntut pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Hal ini dapat tercapai dengan melaksanakan transformasi menuju sistem e-government (Silalahi et al., 2015). Dalam menyikapi persoalan yang ditimbulkan dari implementasi e-government dalam melakukan optimalisasi pelayanan public, membutuhkan keberanian dan komitmen yang kuat bagi pemangku kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah. Pencapaian Kesuksesan implementasi e-government membutuhkan sebuah manajemen perubahan yang kuat sehingga terobosan-terobosan mengejutkan melalui Inovasi e-government dapat mendorong perbaikan pelayanan publik untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan (Elysia et al, 2017).

Ada beberapa kriteria pengembangan e-Government melalui jaringan komunikasi dan informasi dan bentuk web, yang dikembangkan baik dari pemerintah pusat maupun daerah diantaranya yaitu; pertama, penyediaan layanan informasi pada situs web pemerintah berorientasi pada kebutuhan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. kedua, pengembangan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menyatukan visi-misi pemerintah. Sehingga, informasi yang diakses sesuai yang diinginkan. Ketiga, penyediaan pembaharuan isi informasi yang lebih efektif pada situs pemerintah. Keempat, menyediakan layanan komunikasi dua arah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan pertanyaan serta memberikan pandangan mereka. Lebih lanjut, dalam membangun sebuah sistem e-government Yong (2003) mengemukakan bahwa di dalam sistem tersebut harus memiliki prinsip dasar apabila ingin mengembangkan pelayanan secara online atau e-service. Adapun lima indikator yang harus diperhatikan yaitu: Mudah diakses (Accessibility), Pelayanan harus selalu tersedia

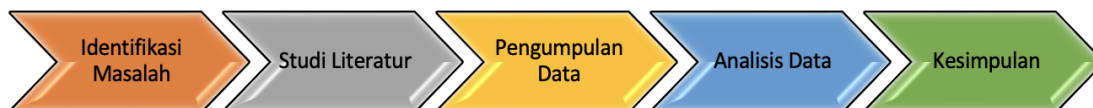


(Availability), Keamanan dan kepercayaan masyarakat (Security and Accountability), Hubungan (Integrability), dan Biaya (Sustainability).

Dengan demikian, implementasi dan pembangunan e-govermen menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dimana masih banyak pemerintahan mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaan e-govermen. Hambat tersebut tentu saja akan sangat dirasakan terutama di daerah yang jauh dari jangkauan kemajuan dalam hal ini wilayah yang masuk dalam kategori daerah (3T) terluar, terpencil, dan tertinggal. Daerah ini merupakan gerbang tapal batas negara Indonesia. Daerah 3T tergolong sebagai daerah yang masih dinilai memerlukan bantuan dalam berbagai sektor. Mulai dari Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya (Syarifah, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis tentang bagaimana implementasi e-government di wilayah 3T, dimana mengambil studi kasus di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori daerah 3T.

METODE

Dalam konteks pengembangan e-government di daerah 3T yang memiliki tantangan infrastruktur dan akses yang terbatas, langkah-langkah metode penelitian yang diambil menjadi sangat krusial. Proses identifikasi masalah, studi literatur, serta pengumpulan dan analisis data melalui kuesioner dan wawancara merupakan upaya yang terfokus untuk memahami secara mendalam bagaimana e-government dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan dengan keterbatasan sumber daya teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk mengatasi hambatan-hambatan yang spesifik dalam menerapkan e-government di daerah 3T. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Workflow Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif, yang fokus pada pemahaman mendalam terkait implementasi e-government di daerah 3T. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail fenomena yang diamati. Melalui penggunaan kuesioner dan wawancara tak terstruktur, data diperoleh dari 10 responden Aparatur Sipil Negara dan 100 responden dari masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Kuesioner memberikan kerangka struktural bagi tanggapan responden, sementara wawancara tak terstruktur memungkinkan penggalian informasi lebih mendalam secara fleksibel. Kombinasi metode ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap tantangan dan peluang dalam penerapan e-government di lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur seperti daerah 3T.

Dalam penelitian ini kuesioner yang diberikan kepada 100 responden memuat kisi-kisi terstruktur yang mencakup beberapa indikator kunci terkait implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Indikator	Sub Indikator
Kemudahan Akses (<i>Accessibility</i>)	Sistem Informasi dan layanan digital pemerintahan mudah diakses
	Kecepatan dalam pelayanan
Pelayanan selalu tersedia (<i>Availability</i>)	Kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat
Keamanan dan kepercayaan (<i>security and accountability</i>)	Keamanan data dan kepercayaan masyarakat
Integrasi (<i>Integrability</i>)	Akses jaringan internet
	Sarana dan prasarana
Biaya (<i>Sustainability</i>)	Keringanan biaya dan pembiayaan

Dalam Tabel 1 terdapat lima indikator utama yang akan diukur melalui kuesioner. Pertama, "Kemudahan Akses" mengevaluasi seberapa mudahnya akses terhadap sistem informasi dan layanan digital pemerintahan serta kecepatan dalam pelayanan yang diberikan. Kedua, "Pelayanan Selalu Tersedia" fokus pada kelancaran aliran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga, "Keamanan dan Kepercayaan" mengukur tingkat keamanan data yang disediakan oleh sistem e-government serta seberapa jauh masyarakat mempercayai sistem tersebut. Keempat, "Integrasi" menilai ketersediaan akses jaringan internet dan infrastruktur fisik yang mendukung penggunaan e-government. Terakhir, "Biaya" mengevaluasi biaya yang diperlukan untuk mengakses layanan e-government dan keberlanjutan pembiayaan layanan tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kuesioner memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menganalisis adopsi dan implementasi e-government di daerah tersebut.

Penelitian ini tidak hanya mengandalkan kuesioner sebagai sumber data, namun juga menggunakan hasil dari wawancara sebagai komponen penting dalam proses analisis. Wawancara memberikan dimensi yang lebih mendalam dalam pemahaman konteks, persepsi, dan pengalaman langsung dari responden terkait implementasi e-government di daerah 3T. Dengan menggabungkan data dari kuesioner dan wawancara, penelitian ini memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi e-government di lingkungan 3T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisa data, maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

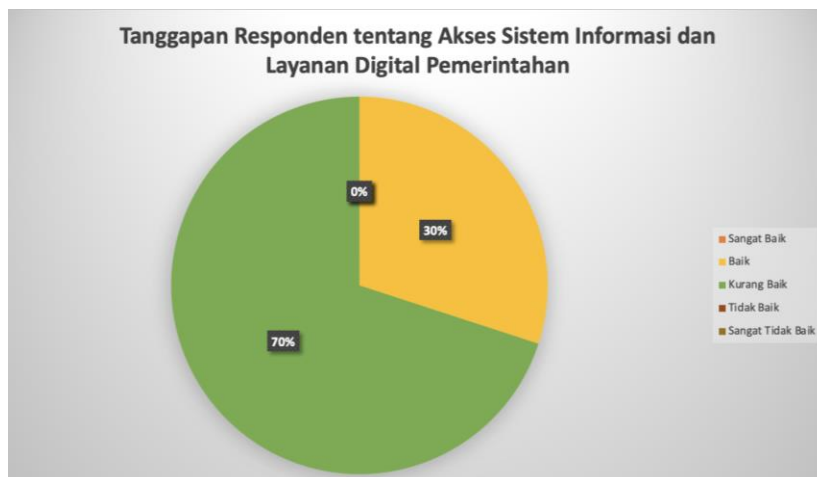
Tabel 2. Karakteristik Responden Aparatur Sipil Negara

Responden	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Masa Kerja
1	Laki-laki	31-35 Tahun	Plt. Kepala Dinas	7 Tahun
2	Perempuan	31-35 Tahun	Bendahara	14 Tahun
3	Laki-laki	41-45 Tahun	Pelaksana	14 Tahun
4	Perempuan	51-55 Tahun	Plt. Kepala Bagian	19 Tahun
5	Laki-laki	51-55 Tahun	Kepala	34 Tahun
6	Perempuan	31-35 Tahun	Aparat Kampung	-
7	Laki-laki	45-50 Tahun	Kepala Kampung	-
8	Perempuan	41-45 Tahun	Sekretaris	-
9	Laki-laki	35-40 Tahun	Kasubag	-
10	Laki-laki	35-40 Tahun	Sekretaris Kampung	-

Sumber: Olah data primer, 2023

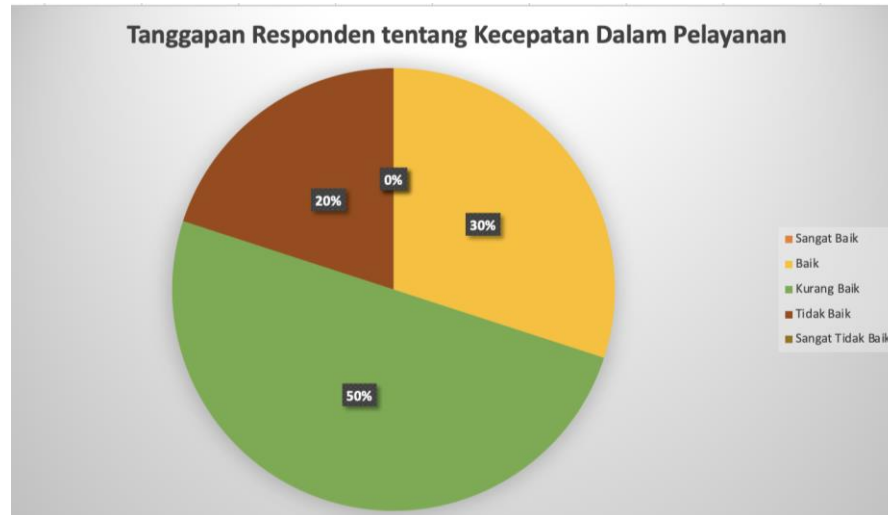
Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 4 orang. Pada tabel tersebut juga diketahui sebagian besar responden berusia 31-35 tahun dengan jumlah 5 orang, jumlah responden dengan usia 41-45 tahun 2 orang, responden berusia 45-50 tahun 1 orang, dan responden berusia 51-55 tahun berjumlah 2 orang.

Indikator Kemudahan Akses (Acesbility)



Gambar 2. Tanggapan Responden Tentang Akses Sistem Informasi Dan Layanan Digital Pemerintahan

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjumlah 70% orang menjawab bahwa akses sistem informasi dan layanan digital pemerintahan **kurang baik**. Selebihnya 30% responden menjawab baik.

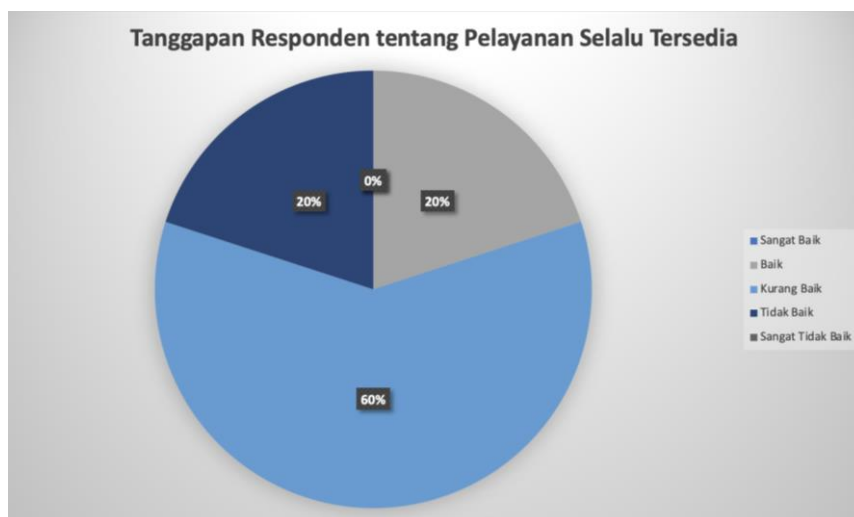


Gambar 3. Tanggapan Responden Tentang Kecepatan Dalam Pelayanan

Berdasarkan gambar 3 sebagian besar responden sejumlah 50 orang menjawab bahwa kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat **kurang baik**, 20 orang menjawab tidak baik, dan 30 orang menjawab baik.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa indikator kemudahan akses dengan sub indikator akses system informasi dan layanan digital pemerintahan serta kecepatan layanan dapat dikatakan bahwa sebagian besar jawaban responden **kurang baik**. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara tidak terstruktur kepada responden, yang mana ia mengatakan bahwa *"Akses sistem informasi dan layanan digital di Kabupaten Jayawijaya masih belum optimal, sebaiknya melihat situasi dan kondisi serta kemampuan masyarakat juga elemen-elemen yang terlibat untuk menentukan kesiapan e-government"*.

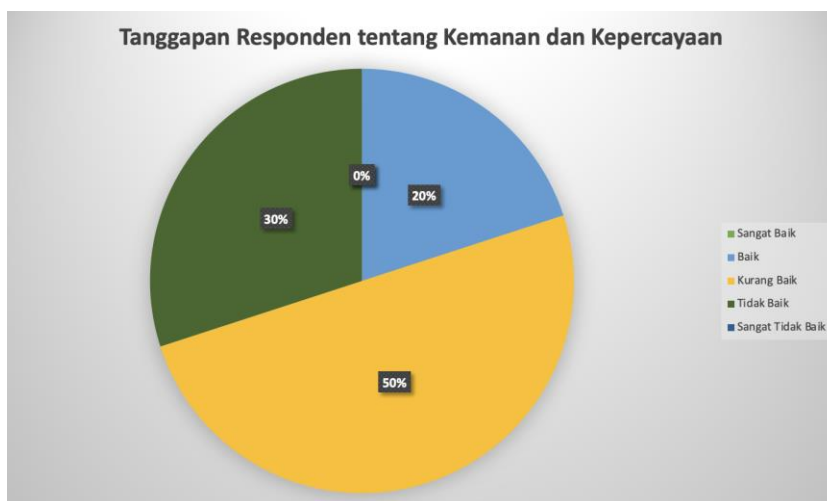
Indikator Selalu Tersedia (Availability)



Gambar 4. Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Selalu Tersedia

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar tanggapan responden sebesar 58 orang menjawab **kurang baik**, sedangkan 21 orang menjawab baik dan 21 orang menjawab tidak baik. Kemudian didukung oleh tanggapan responden pada hasil wawancara mengatakan bahwa *“Dengan system informasi digital yang dibuat kurang maksimal, maka sering terjadi pelayanan yang ditunda. Akhirnya seperti biasa kembali lagi ke system konvensional”*.

Indikator Keamanan dan Kepercayaan Masyarakat

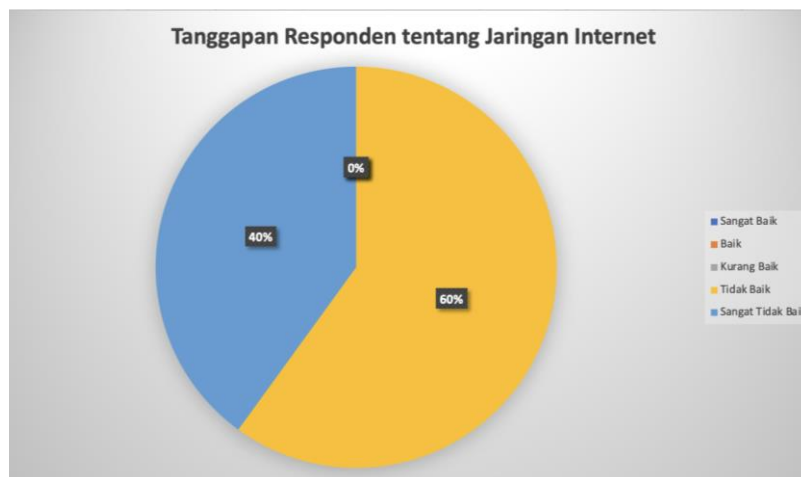


Gambar 5. Tanggapan Responden Tentang Keamanan dan Kepercayaan

Berdasarkan gambar 5 responden sejumlah 50% menjawab bahwa keamanan dan kepercayaan masyarakat tentang pelayanan elektronik government di Kabupaten

Jayawijaya **kurang baik**, kemudian 30% responden menjawab tidak baik, dan 20% responden menjawab baik. Salah satu responden yang menjawab kurang baik, mengatakan bahwa *"jika e-government perlahan diterapkan secara konsisten, maka masyarakat pun akan lebih percaya terhadap keamanannya"*.

Indikator Integrasi



Gambar 6. Tanggapan Responden Tentang Jaringan Internet

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa 60% responden menjawab **tidak baik**, selebihnya 40% menjawab sangat tidak baik. Responden melanjutkan dengan wawancara tidak terstruktur yang mengatakan bahwa *"Jaringan internet di Kabupaten Jayawijaya sudah tidak asing lagi jika dikatakan tidak baik. Bahkan penggunaan wifi pun terkadang masih kurang maksimal. Apalagi di Kabupaten Jayawijaya masyarakat hanya menggunakan provider Telkomsel sebagai media komunikasi. Namun demikian, pemerintah sudah mulai adakan perubahan seperti adanya pemasangan wifi di berbagai daerah terpencil yang biasa disebut (bakti aksi). Meskipun demikian Ketika banyak yang menggunakan tetap jaringan akan down."*

Indikator Biaya



Gambar 7. Tanggapan Responden Tentang Pembiayaan

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan bahwa 50% responden menjawab **hemat biaya** dalam implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya, 30% responden menjawab boros, dan 20% responden lainnya menjawab sangat hemat. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada 3 responden dengan kategori jawaban berbeda-beda. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: responden mengatakan “hemat biaya dikarenakan tidak perlu lagi datang ke kantor-kantor untuk pengurusan segala pelayanan birokrasi yang mana akan keluar lebih banyak biaya seperti bensin, uang makan, pulsa”. Selanjutnya responden mengatakan “*boros karena akan lebih banyak menggunakan paket data untuk mengakses internet. Terlebih ketika tidak dapat diakses melalui ponsel maka harus mencari wifi di café-café terdekat. Selain itu, jika system layanan digital tidak juga berhasil melayani dengan baik, maka terpaksa harus pergi ke kantor lagi untuk pengurusan ulang*”. Responden terakhir yang menjawab sangat hemat, beliau menguraikan hal serupa dengan responden pertama. “*Implementasi e-government akan sangat hemat dari sisi pembiayaan karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja.*”

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator. *Pertama*, implementasi e-government di Daerah 3T Kabupaten Jayawijaya Papua pada indikator pertama, kemudahan akses (Accesbility) dikatakan kurang baik, hal tersebut dideskripsikan dari hasil responden yang sebanyak 70% menjawab kurang baik. Dimana didukung oleh hasil wawancara yang ditemukan bahwa akses sistem informasi dan layanan digital di Kabupaten Jayawijaya masih belum optimal, masyarakat menyarankan untuk terlebih dahulu melihat tingkat kesiapan dari semua elemen terkait. *Kedua*, indikator selalu tersedia (availability) dikatakan kurang baik, hal tersebut ditunjukkan pada hasil jawaban responden sebanyak 60%. Selanjutnya didukung oleh hasil wawancara yang mengatakan bahwa penerapan sistem informasi digital sebaiknya dilakukan dengan konsisten agar tidak kembali ke system konvensional. *Ketiga*, indikator keamanan dan kepercayaan (security and accountability) dikatakan kurang baik, hal tersebut ditunjukkan pada hasil jawaban responden sebanyak 50% dan didukung oleh hasil wawancara yang ditemukan bahwa konsistensi penerapan e-government berpengaruh terhadap kepercayaan dan keamanan masyarakat. *Keempat*, indikator integrasi dikatakan tidak baik. Dari hasil jawaban responden 60% menjawab bahwa jaringan internet di Kabupaten Jayawijaya meskipun sudah melakukan perubahan berupa pemasangan wifi, namun masih saja belum maksimal bandwidthnya. Hal ini menjadi penting dalam upaya penerapan e-government di daerah 3T, Kabupaten Jayawijaya. *Kelima*, indikator biaya. Dalam implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya, 30% responden menjawab boros, dan 20% responden lainnya menjawab sangat hemat. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada 3 responden dengan kategori jawaban berbeda-beda. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: responden mengatakan “hemat biaya dikarenakan tidak perlu lagi datang ke kantor-kantor untuk pengurusan segala pelayanan birokrasi yang mana akan keluar lebih banyak biaya seperti bensin, uang makan, pulsa”. Selanjutnya responden mengatakan “*boros karena akan lebih banyak menggunakan paket data untuk mengakses internet. Terlebih ketika tidak dapat diakses melalui ponsel maka harus mencari wifi di café-café terdekat. Selain itu, jika system layanan digital tidak juga berhasil melayani dengan baik,*

maka terpaksa harus pergi ke kantor lagi untuk pengurusan ulang". Responden terakhir yang menjawab sangat hemat, beliau menguraikan hal serupa dengan responden pertama. "Implementasi e-government akan sangat hemat dari sisi pembiayaan karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja."

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara melalui *Forum Group Discussion* dengan Kominfo terkait dengan faktor pendukung dan penghambat berdasarkan hasil survey. Faktor Pendukung implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya yaitu pertama, semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di kabupaten Jayawijaya. Diketahui dari hasil analisis data, terdapat peningkatan jumlah penggunaan internet, android, serta media sosial dari tahun ke tahun. Kedua, adanya berbagai ragam media informasi: media sosial, website, email, whatsapp, telegram, dan lain-lain. Ketiga, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Keempat, wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi telah meningkat. Adapun, faktor penghambat implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut: pertama, luas wilayah Kabupaten Jayawijaya yang belum terjangkau jaringan. Kedua, kemajemukan tingkat Pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi. Ketiga, lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat kabupaten Jayawijaya. Keempat, masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi. Kelima, adaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih lambat. Keenam, kurangnya konsistensi pemerintah dalam penerapan layanan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya Papua masih kurang baik. Hal tersebut berdasarkan olahan data deskriptif dilihat dari 5 indikator seperti kemudahan akses, selalu tersedia, keamanan dan kepercayaan, integrasi, dan biaya. Selanjutnya implementasi e-government di Kabupaten Jayawijaya terdapat 4 (empat) faktor pendukung dan 6 (enam) faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya yaitu: semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di kabupaten Jayawijaya, adanya peningkatan penggunaan internet, adanya berbagai ragam media informasi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi telah meningkat. Faktor penghambat implementasi e-government adalah sebagai berikut: luas wilayah Kabupaten Jayawijaya yang belum terjangkau jaringan. Kemajemukan tingkat Pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi. Lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat kabupaten Jayawijaya. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi. Adaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih lambat. Terakhir, kurangnya konsistensi pemerintah dalam penerapan layanan digital. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan e-government di Kabupaten Jayawijaya.

REFERENSI

- Arjita, U. A. (2017). *E-Government Sebagai Bagian Dalam Smart City*. 15–17.
- Deswanto, R., Adhi Ningsih, S., Kunci, K., Publik, P., & Pemerintahan, S. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH Public Service 1, E-Government 2, Government System 3. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 02(02). www.hukumonline.com,
- Elysia, Vita. (2017). Implementasi E-Governm E N T Untuk Mendorong Pelayan an Publik Yang Terintegr Asi Di Indonesia. *Optimalisasi Peran Sains Dan Teknologi Mewujudkan Smart City*, 353–380.
- Dwivedi, Y. K., Shareef, M. A., Simintiras, A. C., Lal, B., & Weerakkody, V. (2016). A generalised adoption model for services: A cross-country comparison of mobile health (m-health). *Government Information Quarterly*, 33(1), 174–187. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.003>
- Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, N. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 22(2), 340–346. <http://ijpsat.ijsht-journals.org>
- Hasibuan, Z. A., & Santoso, H. B. (2005). Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia, May 2005*, 42–48. <https://doi.org/10.1190/1.1439767>
- Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2), 236–255. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>
- Setyasih, E. T. (2023). REFORMASI BIROKRASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 6, Issue 1).
- Silalahi, M., Napitupulu, D., Patria, G., Ilmu, F., Universitas, K., Jakarta, B., Ilmu, F., Universitas, K., & Jakarta, B. (2015). *KAJIAN KONSEP DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA*. 10–16.
- Sutedjo, B., & Oetomo, D. (2015). *KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM E-GOVERNMENT*.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>

